

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA****(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2021/Khusus - Awal Menjabat)**

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : H. MOCHAMAD TUCHFATUL ANAM
2. Jabatan : HAKIM TINGGI
3. NHK : 651950

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 2.850.322.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m²/58 m² di KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 905.548.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 202 m²/85 m² di KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 534.844.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 231 m²/76 m² di KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.360.245.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 115 m²/36 m² di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 49.685.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 194.000.000

1. MOBIL, TOYOTA SEDAN ALTIS Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOBIL, TOYOTA MPV KIJANG INNOVA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOBIL, TOYOTA MPV KIJANG LGX Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
4. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
5. MOTOR, HONDA MATIC VARIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 12.700.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 89.613.000



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.146.635.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.146.635.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.